

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI PENDUKUNG TUMBUH KEMBANG WAWASAN KEBANGSAAN PADA MATA PELAJARAN PPKn DI SMP NEGERI 7 PALEMBANG

Rahma Danniarti

Guru SMP Negeri 7 Palembang
e-mail: rahmadanniarti28@gmail.com

Abstract: *This study aimed at describing the implementation of Pancasila as the values which supported the improvement and development of national insight on PPKn subject in SMP Negeri 7 of Palembang. This research was a descriptive research using qualitative approach. It was conducted in SMP Negeri 7 Palembang involving the teachers and the students as the object of the research. The data were collected through observation, interviews, and documentation. The validity of the data was measured through triangulation technique. The results showed that students in SMP Negeri 7 began to show the attitude of nationalism, such as: respect for the dignity of human beings as the creation of the Almighty God by reading the holy verses of the Qur'an and Dhuha prayer at zero hour (06:40) ; helped a needy friend, dared to respond to what the teacher had taught. From this study, it is clear that Pancasila is really the foundation and the principal of life of the Indonesian nation. Through Pancasila and PPKn subject, the education in Indonesia is hoped to be able to create the generation whose attitudes and actions really reflect the identity of the Indonesian nation which is based on the values of Pancasila. It is also taught about how to defend the country. If one region in Indonesia is threatened then the threat applies to all Indonesian citizens.*

Keywords: *The Value of Pancasila, National Insight, PPKn Subject*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki wilayah yang sangat luas. Jumlah penduduknya yang besar dari beragam etnis dengan tradisi yang berbeda dan aneka adat istiadat, menambah kekayaan nusantara, keragaman budaya dan adat istiadat menjadi ciri khas perbedaan itu. Juga keragaman keyakinan dan agama pun menambah mozaik keindahan bumi nusantara. Nilai-nilai nasionalisme yang terkandung dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi

perjalanannya bingkai tersebut menemui jalan terjal dan kerikil serta ancaman yang dapat mengoyaknya. Perlu upaya serius untuk menjaga bingkai persatuan dan kesatuan itu dari pengaruh ideologi (radikalisme) yang mengancam baik dari dalam maupun luar negeri. Penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai bingkai persatuan dan kesatuan di implementasi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam rangka tumbuh kembang wawasan kebangsaan (Nuhrison M.Nuh, dkk, : 2015).

Dari pengalaman sejarah, sejak Budi Utomo 1908 yang kita peringati sebagai Hari

Kebangkitan Nasional dan Ikrar Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945 sampai dengan saat ini, kita telah mengalami pasang surut dan dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini kita telah masuk pada era globalisasi, transparansi dan reformasi yang sedang menguji keberadaan bangsa Indonesia, tanpa disadari keadaan tersebut telah mampu menggeser nilai-nilai bangsa yang selama ini terpatri kuat dan menjiwai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila tidak lagi menjadi bagian yang harus dimengerti, dipahami dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya telah menjurus kearah kehidupan individualistik dan materialistik yang mengakibatkan semakin jauh dari nilai-nilai jati diri, kepribadian dan keimanan bangsa Indonesia.

Kecenderungan semakin mudarnya Wawasan Kebangsaan tercermin dari perilaku hidup yang semakin memprihatinkan. Sentimen dan fanatisme suku, ras dan antargolongan semakin menonjol sehingga seringkali rentan terhadap terjadinya gesekan-gesekan dan konflik bernuansa SARA diberbagai daerah. Kondisi tersebut diperparah oleh perbuatan sebagian kelompok masyarakat yang secara sadar menjual bangsanya sendiri kepada bangsa asing dengan menguasai isu-isu HAM, Demokratisasi dan lingkungan hidup untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Sulit rasanya bagi bangsa Indonesia untuk kembali bangkit dari keterpurukan saat ini ditengah deras masuknya paham asing yang bertentangan dengan paham Pancasila sehingga ancaman terjadinya disintegrasi bangsa tanpa disadari telah mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia.

Siswa SMP Negeri 7 Palembang pada pergaulan sehari-hari dilingkungan sekolah sudah menunjukkan hal-hal tersebut, yaitu individualistik, kepribadian dan keimanan semakin jauh. Contohnya: siswa banyak yang tidak bisa sholat dan mengaji; tidak peduli kalau melihat temannya sedang mengalami kesulitan dan kesusahan, malahan mereka senang melihat hal itu; tidak peduli dengan kebersihan lingkungan, kurang sopan kalau berbicara dengan guru dan teman; banyak

Rasa kebangsaan warga negara Indonesia saat ini hanya muncul bila ada suatu faktor pendorong, seperti kasus pengklaiman beberapa kebudayaan dan pulau-pulau kecil Indonesia seperti Sipadan, Ligitan, serta Ambalat oleh Malaysia beberapa waktu yang lalu. Namun rasa

kebangsaan itu kembali berkurang seiring kebangsaan anak bangsa tersebut. Padahal dengan meredanya konflik tersebut, kita masih mampu dan dapat mengatasi

Pada kasus GAM, jarang dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Indonesia yang bersedia menjadi dalam negeri. Baik masalah Poso, masalah sukarelawan untuk membantu menumpas Aceh, masalah Ambon, masalah Papua dan pemberontakan GAM. Tetapi manakala masalah lainnya di Indonesia ini.

rakyat Irak diserang oleh Amerika Serikat, Begitu juga masyarakat dalam banyak orang menangis dan mengumpulkan menyampaikan aspirasinya terlihat betapa dana serta menjadi relawan untuk membantu lunturnya nilai-nilai luhur bangsa ini yang rakyat Irak. Namun, ketika rakyat Aceh tercermin baik dalam orasinya, disakiti, disiksa, diperas dan dibunuh oleh spanduk/poster yang dibentangkan maupun GAM, tidak terlihat adanya kelompok orang tingkah laku yang tidak santun. Pernah terjadi menangis dan berusaha untuk menjadi pada suatu peristiwa demonstrasi, mereka relawan dalam membantu menyelesaikan menginjak-injak dan membakar gambar/foto masalah Aceh. Hal tersebut merupakan presiden yang nota bene sebagai lambang cerminan betapa lunturnya rasa kebangsaan negara dan harus dihormati oleh seluruh anak yang dimiliki bangsa ini. bangsa.

Sebagai perbandingan, dahulu kala Perilaku lain yang sangat ketika presiden Soekarno mencanangkan menguatirkan generasi tua atau para prang Trikora untuk membebaskan Irian Barat dari tua adalah adanya kebiasaan atau budaya tangan penjajah Belanda, orang berbondong-bondong yang banyak melanggar norma-norma agama bondong mendaftarkan diri untuk menjadi dan sosial pada generasi muda. Pergaulan sukarelawan dalam mengusir Belanda dari bebas, seks pranikah, penggunaan narkoba Irian Barat. Hal ini sangat ironis sekali adalah sebagian contoh yang dapat dilihat dengan kondisi saat ini. dari lingkungan generasi muda kita saat ini.

Hal ini ironis dengan fenomena yang Dengan memudarnya rasa kebangsaan ada di negara kita saat ini dimana anak bangsa dapat mengancam dan menghancurkan yang meminta adanya campur tangan pasukan bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena nilai-dari negara asing untuk mengatasi masalah nilai Pancasila sebagai tumbuh kembang dalam negeri baik di Poso maupun di Maluku. wawasan kebangsaan menjadi lemah dan Peristiwa tersebut menunjukkan betapa dapat dengan mudah ditembus oleh pihak rendahnya rasa nasionalisme atau semangat luar. Sekarang bukan dijajah dalam bentuk

fisik, namun dijajah secara mental dan ideologi. nilai-nilai Pancasila terutama paham kebangsaan; (2) tidak terlaksananya

Banyak sekali kebudayaan dan paham barat yang masuk ke dalam bangsa Indonesia terutama rasa kebangsaan; (3) tidak yang berpengaruh negatif dapat dengan terlaksananya pemahaman terhadap nilai-nilai mudah masuk dan diterima oleh bangsa Pancasila terutama semangat kebangsaan.

Indonesia. Dengan terjadinya hal itu, maka Kesadaran bangsa Indonesia tentang akan terjadi akulturasi, bahkan Pancasila, Kewarganegaraan, serta Wawasan menghilangkan kebudayaan dan kepribadian Bangsa sangat rendah. Hal ini dapat kita bangsa yang seharusnya menjadi jati diri lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bangsa. banyak terjadi konflik antargolongan,

Dalam aspek perekonomian negara, demonstrasi *anarkhis*, dan pelanggaran Hak dengan mudarnya rasa kebangsaan Asasi Manusia. Sehingga kesadaran bangsa mengakibatkan perekonomian bangsa Indonesia mengenai hal tersebut ditumbuhkan Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila tertangga. Saat ini masyarakat hanya dan Kewarganegaraan yang diajarkan sejak memikirkan apa yang negara berikan untuk tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

mereka, bukan memikirkan apa yang mereka Revolusi mental harus dimulai dari dapat berikan pada negara. Dengan keegoisan pendidikan, mengingat peran pendidikan inilah, masyarakat lebih menuntut hak sangat strategis dalam membentuk mental daripada kewajibannya sebagai warga negara. anak bangsa. Pengembangan kebudayaan Sikap individual yang lebih mementingkan maupun karakter bangsa diwujudkan melalui diri sendiri dan hanya memperkaya diri ranah pendidikan. Menurut Suprpto (2014) sendiri tanpa memberikan kontribusi pada pendidikan pengembangan karakter adalah negara, mengakibatkan perekonomian negara sebuah proses berkelanjutan dan tidak pernah semakin lemah. berakhir (*never ending process*). Selama

Melihat perkembangan Wawasan sebuah bangsa ada dan ingin tetap eksis, Kebangsaan yang dimiliki komponen bangsa pendidikan karakter harus menjadi bagian saat ini, apabila dibiarkan dapat dipastikan terpadu dari pendidikan alih generasi NKRI yang sangat kita cintai ini akan (Kristiawan, 2016).

berimplikasi terhadap hal-hal sebagai berikut: Mata pelajaran Pendidikan Pancasila (1) tidak terlaksananya pemahaman terhadap dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan

salah satu muatan kurikulum Pendidikan Wawancara merupakan percakapan dengan Dasar dan Menengah sebagaimana maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan oleh dua pihak, yaitu pewawancara Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dan yang diwawancarai yang memberikan Penjelasan Pasal 37 "...dimaksudkan untuk jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, membentuk siswa menjadi manusia yang 2007:135). Wawancara digunakan untuk memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah menjangring data atau informasi yang berkaitan air". Berdasarkan rumusan tersebut, telah dengan pengaruh nilai-nilai Pancasila yang di dikembangkan Mata pelajaran Pendidikan integrasikan dalam mata pelajaran PPKn Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang sebagai pendukung tumbuh kembang diharapkan dapat menjadi wahana edukatif wawasan kebangsaan.

dalam mengembangkan siswa menjadi Observasi yang digunakan untuk manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan menggali data dari sumber data yang berupa cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta Pancasila, Undang Undang Dasar Negara rekaman gambar (Sutopo, 2002: 64). Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Observasi dilakukan untuk melihat muatan Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara materi nilai-nilai Pancasila pada mata Kesatuan Republik Indonesia. pelajaran PPKn sebagai pendukung tumbuh kembang wawasan kebangsaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Dokumentasi digunakan untuk deskriptif dengan menggunakan pendekatan memperoleh data. Studi dokumen dilakukan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk untuk memperoleh data tentang implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pendukung tumbuh kembang wawasan kebangsaan pada mata pelajaran PPKn.

tumbuh kembang wawasan kebangsaan pada Keabsahan data yang digunakan adalah mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 7 teknik triangulasi. triangulasi sebagai teknik Palembang. pengumpulan data yang bersifat

Teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dan sumber data yang wawancara, observasi, dan dokumentasi. telah ada. Bila peneliti melakukan

pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data. Pengujian itu dilakukan dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data (Sugiyono, 2007: 83).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari bermacam-macam suku, adat, serta budaya. Dari keragaman inilah muncul adanya semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya “Berbeda-beda namun tetap satu jua”. Semboyan inilah yang menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia. Bukan hanya suku, adat serta budaya saja yang berbeda. Namun, karakteristik manusia dan pola pemikirannya sangat jauh berbeda antara satu orang atau satu wilayah dengan lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pendidikan yang dapat menumbuhkan sikap kebangsaan antar warga negara Indonesia, sehingga tidak lagi ditemukan adanya perpecahan-perpecahan yang akan mengakibatkan lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berideologi Pancasila yang merupakan suatu tujuan dan identitas bangsa. Sila-sila dalam Pancasila mengandung makna yang sangat luas. Makna-makna ini jika tidak dikaji dan diajarkan kepada generasi penerus bangsa

maka dengan otomotif bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Sehingga bangsa Indonesia dengan mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya bangsa lain yang belum tentu sesuai untuk diterapkan. Dalam hal ini Pancasila berperan untuk mem-*filter* atau menyaring budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jika budaya yang masuk tidak bertentangan dengan jati diri asli bangsa Indonesia, maka kebudayaan tersebut diperbolehkan masuk ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak meninggalkan kebudayaan asli Indonesia yang telah ada sejak dahulu dan dikembangkan oleh warga Indonesia.

Warga Negara Indonesia adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah Indonesia dan harus tunduk dan patuh pada aturan serta norma-norma yang berlaku. Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara seimbang karena akan mempengaruhi kelangsungan hidup mereka dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini perlu diajarkan kepada setiap Warga Negara Indonesia sejak usia dini melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) agar mereka dapat mengetahui, memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya tentang hak dan kewajiban saja yang diajarkan. Namun, juga meliputi wawasan kebangsaan (Santoso: 2005).

Menurut Kristiawan (2015) *Indonesia needs a great quantity and quality of human resources as the main supporter of the development* (Ikhsan, 2014). *Large population is the most important for the progress and setbacks of a nation depends on human factors. The problems of politic, economic, social can also be completed by human resources. However, to solve the problems and deal with the high civilization competition become more advanced, Indonesia needs revitalization and strengthening strong character of human resources. One aspect that can be done to prepare for the strong human character is through education* (Suprpto, 2014). *Education is the only key that can achieve strong human resources* (Suyatno, 2010).

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terdapat kandungan akan nilai-nilai. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional adalah nilai-nilai yang bersifat tetap. Namun, pada penjabarannya dilakukan secara dinamis dan kreatif yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional (pandangan hidup bangsa) membawa dampak bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, dan landasan fundamental bagi setiap

penyelenggaraan negara Indonesia (Kemendikbud, 2016). Pancasila berisi lima sila yang hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai Pancasila tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai Ketuhanan

Nilai Ketuhanan mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Contoh nilai Ketuhanan: saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda: kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan-Nya.

2. Nilai Kemanusiaan

Nilai Kemanusiaan mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya, dan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Contoh nilai Kemanusiaan: pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain.

3. Nilai Persatuan

Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan atau kesadaran rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran bersatu itu tercipta dengan baik jika sungguh-sungguh menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh nilai Persatuan: memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa yang sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Nilai Kerakyatan

Nilai Kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai ini menganut paham demokrasi. Contoh nilai Kerakyatan: mengutamakan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan; mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.

5. Nilai Keadilan

Nilai Keadilan mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun

batiniah. Keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh seluruh bangsa. Contoh nilai Keadilan: bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain; cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa baik material maupun spiritual.

Kelima nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan, ketetapan, keputusan, kebijakan pemerintah, program-program pembangunan dan peraturan-peraturan. Penjabaran nilai-nilai itu disebut nilai instrumental. Hal ini disebabkan nilai-nilai dasar dari Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan menjiwai satu sama lain. Selain itu, semua nilai dasar dari sila-sila Pancasila tersebut harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan bernegara.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dipandang dari aspek sosial budaya adalah bangsa yang beragam yang dari segi kewilayahannya bercorak nusantara, sehingga kita memandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam GBHN telah disebutkan bahwa hakikat Wawasan Kebangsaan diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selain itu dapat disebutkan pula bahwa hakikat Wawasan Kebangsaan adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional.

Menurut Suhady dan Sinaga (2006), Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengadung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Gubernur Lemhannas RI, mengatakan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural tetapi mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan keamanan (Lemhannas: 1994).

Konsep kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi nasional yang tercantum di dalam Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea keempat. Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Dorongan yang melahirkan kebangsaan kita bersumber dari perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan, memulihkan martabat kita sebagai manusia. Wawasan kebangsaan Indonesia menolak segala diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial. Konsep kebangsaan kita bertujuan membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan.

Wawasan kebangsaan Indonesia tidak mengenal adanya warga negara kelas satu, kelas dua, mayoritas atau minoritas. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipergunakannya bahasa Jawa misalnya sebagai bahasa nasional tetapi justru bahasa melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia.

Wawasan kebangsaan mengandung tiga unsur dasar, yaitu wadah (contour), isi (content), dan tata laku (conduct). Wadah (contour) meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki sebuah organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud supra struktur politik, sedangkan wadah kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infra struktur politik.

Isi (content) adalah aspirasi bangsa otonomi daerah harus dapat mencegah yang berkembang di masyarakat dan cita-cita disintegrasi/pemecahan negara kesatuan, serta tujuan nasional yang terdapat dalam mencegah merongrong wibawa pemerintah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Untuk pusat, mencegah timbulnya pertentangan mencapainya bangsa Indonesia harus mampu antara pemerintah pusat dengan pemerintah menciptakan persatuan dan kesatuan dalam daerah. Melalui upaya tersebut diharapkan keragaman yang ada pada Indonesia. dapat terwujud pemerintah pusat yang bersih

Tata laku (conduct) merupakan hasil dan akuntabel dan pemerintah daerah yang interaksi antara wadah dan isi yang terdiri tumbuh dan berkemabng secara mandiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku dengan daya saing yang sehat antar daerah batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan dengan terwujudnya kesatuan ekonomi, mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. kokohnya kesatuan politik, berkembangnya Tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, kesatuan budaya yang memerlukan warga perbuatan, dan perilaku. bangsa yang kompak dan bersatu dengan ciri

Menurut Winarno (2007), tujuan kebangsaan dibedakan menjadi yang berwawasan kebangsaan, sistem tujuan ke dalam dan tujuan ke luar. Tujuan ke pendidikan yang menghasilkan keder dalam yaitu menjamin perwujudan persatuan pembangunan berwawasan kebangsaan. dan kesatuan segenap aspek kehidupan

Wawasan Kebangsaan merupakan nasional yaitu politik, ekonomi, sosial prinsip yang sangat fundamental bagi bangsa budaya, dan pertahanan keamanan. Indonesia dalam mencegah terjadinya Sedangkan tujuan ke luar yaitu terjaminnya disintegrasi bangsa. Hal ini sesuai dengan kepentingan nasional dalam dunia yang serba teori Ernest Renan yang mengatakan bahwa berubah dan ikut serta melaksanakan kebangsaan merupakan suatu kesatuan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-perdamaian abadi dan keadilan sosial serta orang saling merasa setia kawan antara satu mengembangkan suatu kerja sama dan saling sama lain. Kebangsaan tidak dapat disamakan menghormati. dengan yang didasarkan atas kesamaan ras,

Wawasan kebangsaan Indonesia yang bahasa, agama, kepentingan bersama, menjadi sumber perumusan kebijakan geografi atau batas-batas alamiah permukaan desentralisasi pemerintahan dan bumi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama pembangunan dalam rangka pengembangan yang bersinergi antara instansi satu dengan

yang lainnya untuk mewujudkan tujuan memberikan potensi sumber daya yang besar bersama, sehingga perpecahan dapat dihindari bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, seminimal mungkin. Hal ini sejalan dengan menghasilkan cara pandang tentang keutuhan teori sinergitas yang apabila dengan kerja wilayah nusantara yang perlu dipertahankan sama yang tinggi dan saling mempercayai oleh bangsa Indonesia, serta sebagai sarana akan menghasilkan pola komunikasi yang integrasi Nasional.

bersifat sinergitas yang berarti kerja sama Menurut Depdiknas (2003) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan yang terjalin akan menghasilkan keluaran pelajaran Pendidikan Pancasila dan yang lebih besar dari penjumlahan hasil Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran keluaran masing-masing pihak atau manfaat penyempurnaan dari mata pelajaran yang lebih baik. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang

Wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna: (1) wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; (2) wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan; (3) wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik; (4) NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju.

Manfaat yang kita dapatkan dari konsepsi wawasan kebangsaan adalah diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup yang

Menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warganegara Indonesia yang berkarakter Pancasila (Kemendikbud : 2017). Selain itu, melalui penyempurnaan PKn menjadi PPKn tersebut terkandung gagasan

dan harapan untuk menjadikan PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi serta solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional. PPKn

sebagai mata pelajaran yang memiliki misi mengembangkan keadaban Pancasila, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan siswa agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab.

Dalam konteks kehidupan global Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selain harus meneguhkan keadaban Pancasila juga harus membekali siswa untuk hidup dalam kancah global sebagai warga dunia (*global citizenship*). Oleh karena itu, substansi dan pembelajaran PPKn perlu diorientasikan untuk membekali warga negara Indonesia agar mampu hidup dan berkontribusi secara optimal sesuai dinamika kehidupan abad 21. Untuk itu, pembelajaran PPKn selain mengembangkan nilai dan moral Pancasila, juga mengembangkan semua visi dan keterampilan abad ke-21 sebagaimana telah menjadi komitmen global.

Visi misi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 indikator keberhasilan sistem pendidikan nasional khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini diperlukan untuk: (1) menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani oleh bangsa lain; (2) mempererat persatuan dan kesatuan, baik dalam spirit maupun geografi.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mengembangkan potensi siswa dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap

kewarganegaraan termasuk keteguhan, Esa yang hidup bersama dalam berbagai komitmen dan tanggung jawab tatanan sosial kultural.

kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (2) kedudukan dan fungsi sebagai berikut: (1) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*); (3) keterampilan moral/karakter, dan kewarganegaraan khas kewarganegaraan termasuk kecakapan dan Indonesia yang tidak sama sebangun dengan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*). *civic education di USA, citizenship education di UK, talimatul muwatanah* di negara-negara

Secara khusus Tujuan PPKn yang Timur Tengah, *education civicas* di Amerika berisikan keseluruhan dimensi tersebut, Latin; (2) PPKn sebagai wahana pendidikan sehingga siswa mampu: (1) menampilkan nilai, moral/karakter Pancasila dan karakter yang mencerminkan penghayatan, pengembangan kapasitas psikososial pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral kewarganegaraan Indonesia sangat koheren Pancasila secara personal dan sosial; (2) (runut dan terpadu) dengan komitmen memiliki komitmen konstitusional yang pengembangan watak dan peradaban bangsa ditopang oleh sikap positif dan pemahaman yang bermartabat dan perwujudan warga utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara negara yang demokratis dan bertanggung Republik Indonesia Tahun 1945; (3) berpikir jawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 secara kritis, rasional, dan kreatif serta UU No.20 Tahun 2003.

memiliki semangat kebangsaan dan cinta Ruang lingkup mata pelajaran tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara (PPKn), meliputi: (1) Pancasila, sebagai dasar Republik Indonesia Tahun 1945, semangat negara, ideologi nasional, dan pandangan Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara hidup bangsa; (2) Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia, dan (4) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi bertanggung jawab sebagai anggota landasan konstitusional kehidupan masyarakat, tunas bangsa, dan warga bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) negarasesuai dengan harkat dan martabatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia; (4) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai

wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pendukung tumbuh kembang kebangsaan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), maka perlu ditentukan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tersebut. Indikator tersebut, antara lain: (1) penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; (2) Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan berdaulat; (3) cinta akan air dan bangsa; (4) demokrasi atau kedaulatan rakyat; (5) kesetiakawanan sosial; (6) masyarakat adil dan makmur.

Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pendukung tumbuh kembang wawasan kebangsaan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMP Negeri 7 Palembang sudah terlihat antara lain: (1) implementasi nilai Ketuhanan: setiap hari pada jam ke-nol (06.40) siswa membaca ayat suci Al-Quran; setiap pagi siswa mengerjakan sholat dhuha

(2) implementasi nilai Kemanusiaan: kalau melihat temannya sedang mengalami kesulitan dan kesusahan dengan ataupun menjenguk temannya yang mengalami musibah; menjenguk temannya yang sakit, saling menyayangi dengan temannya, sopan kalau berbicara guru dan teman (3) implementasi nilai Persatuan: upacara bendera yang dilaksanakan dengan hikmat; kegiatan pramuka; lomba-lomba waktu class meeting; sudah banyak yang hapal Pancasila dengan diterapkannya membaca Pancasila sebelum pelajaran dimulai (4) implementasi nilai Kerakyatan: siswa mempunyai keberanian untuk bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahaminya; siswa juga berani untuk menanggapi apa yang diajarkan oleh guru (5) implementasi nilai Keadilan: dalam penerimaan siswa baru sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan karena uang yang lebih besar dari yang lainnya seseorang siswa itu diterima; di ruang BK setiap siswa yang bermasalah baik akademik, biaya atau lainnya boleh meminta bantuan kepada sekolah.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Ahmad dkk (2017) yang menyebutkan Guru-guru SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III terlibat dalam proses pembelajaran, diskusi, dan mengambil inisiatif sebagai upaya membangun pendidikan karakter. SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III mengimplementasikan pembelajaran karakter adalah melalui Pendekatan Holistik, yaitu mengintegrasikan

perkembangan karakter ke dalam setiap aspek kehidupan sekolah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pendukung tumbuh kembang wawasan kebangsaan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMP Negeri 7 Palembang sudah terlihat antara lain: (1) implementasi nilai Ketuhanan: setiap hari pada jam ke-nol (06.40) siswa membaca ayat suci Al-Quran; setiap pagi siswa mengerjakan sholat dhuha (2) implementasi nilai Kemanusiaan: peduli kalau melihat temannya sedang mengalami kesulitan dan kesusahan dengan menyumbang ataupun menjenguk temannya yang mengalami musibah; menjenguk temannya yang sakit, saling menyayangi dengan temannya, sopan kalau berbicara guru dan teman (3) implementasi nilai Persatuan: upacara bendera yang dilaksanakan dengan hikmat; kegiatan pramuka; lomba-lomba waktu class meeting; sudah banyak yang hapal Pancasila dengan diterapkannya membaca Pancasila sebelum pelajaran dimulai (4) implementasi nilai Kerakyatan: siswa mempunyai keberanian untuk bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahaminya; siswa juga berani untuk menanggapi apa yang diajarkan oleh guru (5)

implementasi nilai Keadilan: dalam penerimaan siswa baru sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan karena uang yang lebih besar dari yang lainnya seseorang siswa itu diterima; di ruang BK setiap siswa yang bermasalah baik akademik, biaya atau lainnya boleh meminta bantuan kepada sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., Kristiawan, M., Tobari, T., & Suhono, S. (2017). Desain Pembelajaran SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III Berbasis Karakter Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Iqra (Educational Journal)*, 2(2), 403-432.
- Depdiknas. (2003). *Media pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Ikhsan, A. (2014). Construct mental revolution on education. Jambi: Jambiexpres. <http://www.jambiexpres.co.id/berita-19248-mengkonstruksi-revolusi-mental-dalam-pendidikan.html>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Edisi Revisi. (2016). *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Inspirasi Pembelajaran dan Penilaian Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP/MTs*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

- Kristiawan, M. (2015). A Model of Educational Character in High School Al-Istiqamah Simpang Empat, West Pasaman, West Sumatera. *Research Journal of Education*, 1(2), 15-20.
- Kristiawan, M. (2016). Telaah Revolusi Mental Dan Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Pandai dan Berakhlak Mulia. *Ta'dib*, 18(1), 13-25.
- Lemhannas. (1994). *Kewiraan Untuk Mahasiswa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nuhrison M. Nuh, dkk. (2015). *Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Agama RI
- Santoso Budi, dkk. (2005). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suhady, Idup dan A.M. Sinaga. (2006). *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka NKRI*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia
- Suprpto (2014). *Mental revolution from education*. Unika Darma Cendikia: Surabaya.:
<http://www.jawapos.com/baca/artikel/6669/revolusi-mental-dimulai-dari-pendidikan>
- Sutopo, HB. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Suyatno (2010). *Developing cultural education and national character*. Article presented on National Forum by Kopertis 3 Jakarta
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: CV Tamita Utama
- Winarno. (2007). *Paradigma Baru: Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: PT. Bumi Aksara

